



Belanja Tak Langsung

KOORDINATOR

Data dan Informasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ahmad Taufik, menjelaskan bantuan sosial (Bansos), termasuk bagian dari belanja pemerintah. Belanjanya bersifat tidak langsung. Dalam artian, tidak terikat program kegiatan.

"Kalau yang langsung seperti pendidikan, seperti program wajib belajar. Nah, kalau Bansos ini sama dengan belanja pemerintah. Seperti bantuan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan," kata Ahmad Taufik kepada *Tribun*, Kamis (20/2).

Ia menjelaskan, secara aturan, dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri),



mekanisme Bansos tidak boleh berulang. Seumpamanya, tahun ini dapat, maka tahun berikutnya tidak boleh diterima lagi. Juga tidak boleh hanya itu-itu saja.

"Penerima Bansos juga wajib melaporkan dan bertanggungjawabkan bantuan yang diterima. Biasanya semuanya dibagi rata. Namun selama ini, pertanggungjawabannya jarang atau tidak pernah dilaporkan," ujarnya.

Kondisi ini lah menurutnya yang biasanya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagaimana mekanisme pencairannya, untuk aturan

■ **Bersambung ke Hal. 7**

Belanja Tak Langsung

Sambungan Hal. 1

baru Ahmad Taufik mengaku belum mengeceknya. "Namun biasanya ada yang diberikan langsung, ada yang melalui proposal, di mana secara program dan tujuannya jelas. Ini yang menjadi prioritas pemerintah daerah," ujarnya.

Namun yang jadi pertanyaan menurutnya adalah mengapa pemerintah mengalokasikan Bansos. Mengapa tidak dimasukkan ke dalam belanja langsung saja. Sebab kapasitas pemerintah daerah itu tidak terlalu banyak.

Makanya sebagai ditaruh di belanja langsung, di program dan prioritas yang memang

untuk pembangunan daerah. Sebagian lagi ada beberapa seperti hibah dan Bansos. "Mungkin boleh dilihat apakah ada korelasi antara bantuan yang diberikan dengan aplikasinya. Dalam kaitan dengan pemimpin daerah, ini juga bisa dicek. Kenapa misalkan suatu organisasi bisa dapat terus," papar Ahmad.

Dari modus itu menurutnya dilihat, pada audit BPK yang ada, biasanya laporan tidak sesuai dengan kondisi yang ada atau peruntukannya. Laporan yang disebut fiktif itu, hanya laporan tapi tidak dilakukan. "Audit sosial juga bisa. Mi-

salnya ada yang dapat Bansos, kita bisa cek dana tersebut digunakan untuk apa. Artinya peran masyarakat juga dapat dilakukan," tegasnya.

Ia mengatakan Bansos memang rentan dikorupsi karena secara aturan, tidak mengikat. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah daerah cukup besar. Bansos juga rentan terhadap kepentingan politik. "Itu ibaratnya *kan* uang pribadi. Tetapi nyatanya dana APBD maupun APBN. Jadi setiap pemerintah daerah semua mempunyai belanja daerah, siklusnya akan naik ketika ada pemilihan kepala daerah," ujarnya. (zul)